

# BAB IV PENUTUP

## 4.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Bima tahun 2016 memiliki nilai strategis karena penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2016 merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Bima 2013-2018 dan Renstra Bappeda Tahun 2013-2018.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2016.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2016 semuanya telah direalisasikan dengan kategori **Sangat Berhasil** dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 105,30%, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Akuntabilitas Keuangan) sebesar 99,78%.

Rata-rata capaian sasaran strategis I adalah sebesar 109,06% yang terukur melalui 4 (empat) indikator kinerja. Capaian sasaran strategis II yang terukur melalui 2 (dua) indikator kinerja adalah sebesar 98,74% dan capaian sasaran strategis III yang terukur melalui 2 (dua) indikator kinerja adalah sebesar 104,34.

Rata-rata capaian sasaran strategis I, II, dan III terhadap target jangka menengah Bappeda Kota Bima masing-masing sebesar 94,09%, 67,26%,

dan 73,26%. Sehingga rata-rata capaian kinerja tahun 2016 terhadap target jangka menengah Bappeda Kota Bima adalah sebesar 75,60%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Bappeda Kota Bima Tahun 2016 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada tahun 2016 telah berjalan dengan baik.

## 4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Bappeda Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Bappeda sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LAKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini dan dalam rangka memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang lebih baik di masa yang akan datang, maka perlu beberapa langkah tindak lanjut yang dapat diupayakan untuk tahun berikutnya seperti sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penyediaan peraturan daerah tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah untuk menjadi dasar implementasi perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan serta pengendalian hasil perencanaan. Dengan peraturan daerah ini juga akan meningkatkan integrasi dan penyelarasan antar

dokumen perencanaan maupun antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

2. Pengembangan system aplikasi perencanaan yang berbasis teknologi informasi dalam bentuk e-Planning untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
3. Mengembangkan fungsional perencana yang telah dimiliki oleh Bappeda serta mendorong tumbuhnya kader-kader fungsional perencana yang diharapkan akan dapat membawa Bappeda Kota Bima menjadi institusi perencana pembangunan daerah yang kredibel dan professional. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana melalui pendidikan formal dan jalur pelatihan.
4. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.